

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustine, Oly Viana. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2019.
- Ainurrisma, Nafitza, Nur Permatasari, Muhammad Nixon, dan Meyranda Maulina. "KUHP Nasional dan Paradigma Baru Penegakan Hukum Pidana: Menuju Sistem Hukum Yang Responsif dan Progresif," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Madiun: Universitas PGRI Madiun. 2025.
- Anwar, Arizal. "Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Hukum Pidana dan Pemidanaan dalam Perspektif Pancasila". *Proceeding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. 2024.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- _____, *RUU KUHP BARU (Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister. 2022.
- _____, *Tujuan & Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister. 2022.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2008.
- Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2009.
- Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015.
- Gunakarya SA, Widiada dan Mas Putra Zenno J. *Politik Hukum Pidana "Perspektif Pembaharuan Pidana dalam RKUHP"*. Malang: Setara Press. 2021.

- Hiariej, Eddy O.S dan Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2025.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Penyesuaian KUHP Nasional)*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2024.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2017.
- Indonesia Judicial Research Society. *Terjemahan KUHP Belanda (Wetboek van Strafvordering/Sv)*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society. 2025.
- K. Lestari, B. Farhana, Haerani, Ainuddin, Sri Karyati, Muhammad Ikhsan Kamil, dan Ahmad Rifai. *Restorative Justice dalam Pemikiran*. Pidie Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Krismen, Yudi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Remmelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material 3 (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Penerbit Maharsa. 2017.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2020.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Sunarso, Siswanto. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2015.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Ed.1. Cet.4. Depok: Rajawali Press. 2022.
- Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Jawara. 2018.
- Syahputra, Adery. *Tinjauan atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena dalam RKUHP serta Harmonisasinya dengan RKUHAP*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform. 2016.
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan. 2013.

United Nations Office On Drugs and Crime. *Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment*. Vienna: United Nations publication. 2007.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Editor: Kasim et.al. Jakarta: Elsam dan Huma. 2002.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.

Putusan Nomor 197/Pid.B/2025/PN Bko atas nama Terdakwa Togar Tande Siringo Ringo alias Togar Anak dari Argius Siringo Ringo terkait tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre terkait tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Iskadrenda, Gaza Carumna. *Jenis Putusan Pengadilan Dalam Mengaplikasikan Asas Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) di*

KUHAP Pada Masa Mendatang. Tesis. Universitas Gadjah Mada. 2018.

Lestari, Sukma Diah Ayu. *Latar Belakang dan Implikasi Pemberlakuan Asas Rechterlijk Pardon di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. 2023.

Jurnal

Alhakim, Abdurrahman. "The Ideas of Rechterlijk Pardon as a Restorative Justice Approach: From Vengeance to Recovery?" *Ganesha Law Review*. Volume 5. Nomor 1. (2023).

Anisyanawati, Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati, dan Hemmalika Alyanti Chandra. "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch". *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*. Volume 3. Nomor 1. (2025).

Aprilianda, Nurini. "Menggali Makna Pemaafan Hakim Bagi Anak Melalui Ratio Legis Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak". *ARENA HUKUM*. Volume 19. Nomor 2. (2023).

Butarbutar, E. Nurhaini. "Antinomi dalam Penerapan Asas Legalitas dalam Proses Penemuan Hukum". *Yustisia*. Volume 1. Nomor 1. (2012).

Cassilas, Anggian dan Rugun Romaida Hutabarat. "Prinsip Individualisasi Pidana dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan". *UNES Law Review*. Volume 6. Nomor 2. (2023).

Fauzi, Suyogi Imam. "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 51. Nomor 3. (2021).

Hafendi, Doni dan Wilma Silalahi. "Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian Terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian". *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 5. Nomor 12. (2024).

Harahap, Aswindari, Rahmayanti, Rudi Tiono, dan Bambang Agus Priyono. "Analisis Diskresi Hakim dalam Mengintegrasikan Rekomendasi Penalaran Hukum Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di Pengadilan Niaga". *Locus Journal of Academic Literature Review*. Volume 4. Nomor 9. (2025).

Harefa, Safaruddin, Sri Ismawati, dan Mega Fitri Hertini. "Transformasi Kebijakan Pidana dalam KUHP Nasional; Menuju Sistem Pidana yang Berkeadilan dan Humanis". *Simbur Cahaya*. Volume 32. Nomor 2. (2025).

- Hartanto dan Fifink Praiseda Alviolita. “Penerapan Keseimbangan Monodualistik dalam Hukum Pidana (Terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Analisis Hukum*. Volume 7. Nomor 1. (2024).
- Hunowu, Bella Putri, Fenty U. Puluhulawa, dan Weny Almoravid Dunga. “Urgensi Rechterlijk Pardon dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*. Volume 7. Nomor 2. (2023).
- Jadidah, Fikrotul. “Kasus Nenek Minah Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Positivisme”. *IBLAM Law Review*. Volume 2. Nomor 3. (2022).
- Kartikasari, Revinta Irma dan Subekti. “Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian pada Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus pada Polres Madiun Kota). *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*. Volume 2. Nomor 3. (2025).
- Karyadi, I Putu Dede dan Putu Sekarwangi Saraswati. “Peranan Diskresi Hakim dalam Kewenangan Mengadili”. *Jurnal Hukum Mahasiswa*. Volume 2. Nomor 1. (2022).
- Latifah, Marfuatul dan Prianter Jaya Hairi. “Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim”. *Jurnal Negara Hukum*. Volume 15. Nomor 2. (2024).
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, V. Rahmati, dan Alifian Fahdzan Mardany. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia”. *HUKMY: Jurnal Hukum*. Volume 3. Nomor 1. (2023).
- Meliala, Nefa Claudia. “Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Volume 8. Nomor 3. (2020).
- Mubarok, Nafi’. “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan”. *Al-Qanun*. Volume 27. Nomor 1. (2024).
- Nugroho, Wahyu, Afiah Nurrizky, dan Muliadi Nur. “Pembinaan Anak Pelaku Tawuran sebagai Implementasi Keadilan Rehabilitatif di Sentra Handayani Jakarta”. *Indonesia Journal of Criminal Law*. Volume 6. Nomor 1. (2024).
- Nurfatlah, Titin, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, dan Saparudin Efendi. “Konsep Residivisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Nasional Ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”. *Unizar Law Review*. Volume 7. Nomor 1. (2024).
- Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda. “Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Volume 4. Nomor 2. (2024).
- Pariarsana, I Wayan, Joko Jumadi, dan Ruli Ardiansyah. “Analisis Penerapan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai *Judicial Pardon* terhadap Anak yang Melakukan Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Rgt)”. *Jurnal Parhesia*. Volume 2. Nomor 1. (2024).
- Pohan, Maulia Permata Rizki, Edi Yunara, dan Putri Rumondang Siagian. “Penerapan Prinsip *Due Process of Law* terhadap Keabsahan Penetapan Tersangka yang Tidak Didahului Pemeriksaan (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Volume 14. Nomor 1. (2026).
- Pradana, Yudha. “Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam Proses Persidangan Anak Secara Elektronik pada Masa Pandemi di Kota Jakarta Barat”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Volume 1. Nomor 2. (2022).
- Putri, Novalinda Nadya dan Muhammad Enaldo Hasbaj. “Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum”. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*. Volume 6. Nomor 3. (2026).
- Saputro, Adery Ardhan. “Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP”. *MIMBAR HUKUM*. Volume 28. Nomor 1. (2016).
- Sarwandari, Aninda Putri dan Agus Machfud Fauzi. “Ketidakadilan Hukum di Indonesia dalam Penanganan Kasus Nenek Asyani”. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. Volume 2. Nomor 5. (2025).
- Sholahudin, Umar. “Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo)”. *Dimensi*. Volume 9. Nomor 1. (2016).
- Sitanggang, Nova Yolandya, La Syarifudin, dan Nur Aripkah. “Tinjauan Yuridis Asas Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik*. Volume 3. Nomor 1. (2026).

- Sitompul, DPM. "Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 18. Nomor 6. (2017).
- Wicaksono, Benny Satrio, Ismansyah, dan Edita Elda. "Rechterlijk Pardon sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. Volume 7. Nomor 4. (2025).
- Wulandari, Dyah Ayu, Intan Inayatun Soeparna, Viola Azzahra Deavva, dan Thalia Ongko Wijoyo. "Analisis Penerapan Pasal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis". *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*. Volume 2. Nomor 11. (2024).
- Yarus, Muhammad Hazwi dan Zainudin Hasan. "Konsep Rechterlijk Pardon dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*. Volume 3. Nomor 4. (2025). <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1070>.

Internet

- Auli, Renata Christha, "Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi dan Grasi". *hukumonline.com*. Januari 6. 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/amnesti-rehabilitasi-abolisi-dan-grasi-lt4bd6dab5117a4/>. diakses 30 Maret 2026.
- Farig, Muamar Azmar Mahmud. "Pemaafan Hakim: Potensi Risiko dan Mitigasinya." *dandapala.com*. September 7. 2025. <https://dandapala.com/article/detail/pemaafan-hakim-potensi-risiko-dan-mitigasinya>. diakses 5 Maret 2026.
- Kurniawan, Heru. "Beda Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana". *hukumonline.com*. Juli 9. 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-alasan-pembena-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana-lt686f49205392b/>. diakses 3 April 2026.
- Muqorobin, Mohammad Khairul. "Reformasi KUHAP 2025: Sebuah Analisis Komprehensif terhadap Konstruksi Sistem Pembuktian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan dalam Rangka Harmonisasi dengan KUHPP Nasional". *suarabsdk.com*. <https://suarabsdk.com/reformasi-kuhap-2025-sebuah-analisis-komprehensif-terhadap-konstruksi-sistem-pembuktian-dan-jenis-jenis-putusan-pengadilan-dalam-rangka-harmonisasi-dengan-kuhpn-nasional/>. diakses 17 Mei 2026.

- Permadi, Ferdian. "Law as the Art of Interpretation: Tantangan Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Masa Peralihan KUHP 2023 dan KUHP 2025". *MARINews*. Januari 7. 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tantangan-hakim-dan-aparatur-peradilan-dalam-masa-peralihan-0Kz>. diakses 5 April 2026.
- Reformasi KUHP. "Timeline Rancangan KUHP". <https://reformasikuhp.id/timeline/>. diakses 15 Mei 2026.
- Satrio P, Anandy. "Rechterlijk Pardon: Gagasan dan Tantangan Instrumen Humanisme Hukum". *MARINews*. Agustus 13. 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/rechterlijk-pardon-gagasan-dan-tantangan-instrumen-humanis-0tY#:~:text=Kesimpulan-,Rechterlijk%20Pardon%20atau%20biasa%20yang%20disebut%20pemaafan%20hakim%20merupakan%20suatu,demikian%20ketika%20dihadapkan%20dengan%20rasa>. diakses 2 Maret 2026.
- Wahyuni, Willa. "Alasan Pembena sebagai Penghapus Tindak Pidana", *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pembena-sebagai-penghapus-tindak-pidana-lt632ae5013591c/>. diakses 3 Mei 2026.
- Wijaksana, Muhamad Mahrus Setia. "Perkembangan Formulasi Asas Legalitas Dalam Sistem Pidana di Indonesia (Studi Komparatif antara KUHP/WvS & RUU KUHP 2019)". Badan Pembinaan Hukum Nasional. Juli 23. 2020. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/329>. diakses 11 April 2026.
- Yasin, Muhammad. "Catatan Penting tentang Antinomi Hukum". *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt698bc36eb46de/catatan-penting-tentang-antinomi-hukum/>. diakses 16 Mei 2026.